



KPK Tetapkan Mantan Dirut Petral Tersangka

JAKARTA-RK. Butuh waktu empat tahun bagi KPK untuk menyelidiki indikasi korupsi PT Pertamina Trading Limited (Petral). Kemarin (10/9) lembaga antirasuah itu menetapkan seorang tersangka dalam perkara perdagangan minyak mentah yang sempat ramai pada 2015 silam.

Tersangka tersebut adalah Bambang Irianto, managing director Pertamina Energy Service (PES) Pte. Ltd (2009-2013). Bambang juga pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) Petral sebelum dilakukan pergantian pada 2015. PES dan Petral sama-sama merupakan perusahaan subsidiari Pertamina.

Bambang diduga menerima suap USD 2,9 juta (Rp 40,837 miliar) dari Kernel Oil, perusahaan perdagangan minyak di Singapura. Uang suap itu dikirim ke rekening SIAM Group Holding milik Bambang di British Virgin Island. "Atas bantuan (Bambang) kepada Kernel Oil terkait perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Kasus itu berawal dari indikasi adanya praktik mafia migas dalam perdagangan minyak yang dilakukan anak perusahaan Pertamina. Yakni, Petral dan PES. Indikasi permainan itu yang konon melatarbelakangi pembubaran Petral pada Mei 2015.

Dalam penelusuran awal, KPK menemukan bahwa kegiatan perdagangan minyak dan produk kilang sejatinya dilakukan PES. Petral hanya sebagai paper company atau perusahaan bayangan yang tidak memiliki kegiatan bisnis pengadaan dan penjualan aktif. Untuk diketahui, Petral berkedudukan hukum di

Hongkong, sedangkan PES berkantor di Singapura.

Laode menjelaskan, Bambang awalnya diangkat menjadi Vice President (VP) Marketing PES pada 6 Mei 2009. Tugasnya membangun dan mempertahankan jaringan bisnis dengan komunitas perdagangan. Setahun sebelumnya, Bambang yang kala itu masih bekerja di kantor pusat Pertamina bertemu dengan perwakilan Kernel Oil.

Nah, saat menjabat VP Marketing, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina. Pengadaan itu dapat diikuti national oil company, major oil company, refinery, maupun trader. Saat itu Kernel Oil juga beberapa kali diundang dan menjadi rekanan kegiatan impor serta ekspor minyak mentah untuk PES.

Pada 2012, Pertamina melakukan peningkatan efisiensi perdagangan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) atas perintah presiden. Efisiensi itu dilakukan dengan memprioritaskan pembelian langsung ke sumber-sumber utama. Urutan prioritas yang dimaksud adalah national oil company, refinery/producer, dan potential seller/buyer.

Dengan aturan itu, perusahaan Kernel Oil tidak bisa lagi menjadi rekanan prioritas. Karena itu, Kernel Oil diduga menggunakan bendera Emirates National Oil Company (ENOC) agar bisa ikut kegiatan perdagangan minyak dan produk kilang PES. "ENOC pun diundang (ikut pengadaan) sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerja sama dengan national oil company," ungkap Laode.

Selama proses penyelidikan KPK memeriksa sebanyak 53 saksi. Lalu, di tahap penyidikan, lima lokasi digeledah. Yakni, rumah di Jalan Pramukasari 3 Jakarta; rumah di kompleks Ligamas, Pancoran; rumah di Cempaka Putih Timur; rumah di Jalan Cisanggiri II Petogogan, Kebayoran Baru; erta apartemen di Salemba Residence.

KPK mengakui penanganan perkara tersebut tidak gampang. Sebab, alur suap melewati berbagai negara. British Virgin Island, negara tempat Bambang menampung uang, juga termasuk yurisdiksi asing yang tergolong tax heaven countries atau negara suaka pajak. "Semoga perkara ini dapat menjadi kotak pandora untuk mengungkap skandal mafia migas yang merugikan rakyat."

Vice President Corporate Communication Fajriyah Usman mengatakan saat ini fungsi Petral telah digantikan oleh ISC (Integrated Supply Chain). "Di internal organisasi Pertamina," katanya kemarin (10/9). Integrated Supply Chain (ISC) memiliki tiga peran utama. Pertama sebagai perencanaan dan optimasi terintegrasi. Kedua, pengadaan atau penjualan niaga dan komersial.

Serta operasional suplai dan ekspor untuk memastikan keamanan suplai dan stok minyak mentah, bahan bakar minyak dan elpiji nasional dengan tetap mengedepankan keekonomian. Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas Fahmy Radhi mengatakan dengan adanya ISC tersebut Pertamina memang mampu melakukan penghematan. "ISC juga mudah dikontrol oleh BPK dan KPK karena perusahaannya di dalam negeri," katanya.

Dia pun mengapresiasi keputusan KPK atas penetapan tersangka dalam mafia migas tersebut. Dia memaparkan, hasil kajian Tim Anti Mafia Migas menyimpulkan bahwa Petral digunakan oleh Mafia Migas untuk memburu rente dari monopoli Petral dalam impor BBM. Modus pemburuan rente dilakukan dalam bidding dan blending penyediaan impor BBM. "Memang dalam bidding dilakukan secara on line, tetapi ada anomali bahwa pemenang tender selalu dari NOC negara2 bukan penghasil minyak, seperti Thailand, Italia, dan Maldives," paparnya.

Ternyata NOC tersebut hanya digunakan sebagai frontier mafia migas untuk memasok BBM dengan harga mark up. Kala itu, jenis BBM yang di mark up adalah premium karena sudah tidak dijual di pasar internasional sehingga standar harganya tidak ada di pasar. Pengadaan dilakukan melalui blending yang harganya juga di mark up. Harga BBM yang mahal, karena mark up, dibeli oleh Pertamina lalu dijual di pasar dalam negeri dengan memberikan subsidi yang dialokasikan dari APBN.

"Perampokan APBN dilakukan oleh Mafia Migas melalui pembelian BBM dengan harga BBM yang mahal dan subsidi," terangnya. Tim Anti Mafia Migas sudah melaporkan hasil kajian tersebut ke KPK, namun KPK kesulitan menemukan alat bukti untuk menjerat pelaku Mafis Migas. "Harapannya KPK masih bisa memburu mafia migas lainnya," imbuhnya. Seperti orang Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri dan menjadi penyedia-pasokan BBM yang di mark up kala itu. (Jawa Pos/JPG)